

**EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN TANGERANG,
PROVINSI BANTEN**

Tesis

**Oleh
PUTRI HANDAYANI
NPM 2226021009**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN TANGERANG,
PROVINSI BANTEN**

Oleh

**PUTRI HANDAYANI
NPM 2226021009**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

Oleh

PUTRI HANDAYANI

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi masyarakat dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pelaksanaan kebijakan PKK yang dituangkan dalam 10 program pokok PKK di Kabupaten Tangerang terindikasi masih mempunyai beberapa masalah yaitu degradasi rasa kesatuan bangsa, tingginya angka putus sekolah, belum optimalnya ketahanan pangan, masih adanya rumah tidak layak huni dan angka stunting yang tidak pernah habis. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keberhasilan program PKK dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan indikator evaluasi dari Gerakan PKK (2021) yaitu *input*, *process*, *output* dan *outcome* dan indikator kesejahteraan keluarga menurut Suryani (2023) yaitu ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Hasil evaluasi menunjukkan dampak dari 10 program dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu pada ekonomi yaitu pada meningkatnya produksi pangan di tingkat keluarga dan adanya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di setiap desa. Aspek sosial, sudah banyak terbentuknya kelompok – kelompok masyarakat seperti rukun kematian, kelompok jimpitan dan kelompok arisan. Pada aspek kesehatan ditandai dengan turunnya angka keluarga beresiko stunting dari 77.608 kasus di tahun 2023 menjadi 51.938 pada tahun 2024. Pada sektor pendidikan PKK telah memfasilitasi sebanyak 3.037 siswa kejar paket dan mendirikan 500 PAUD sejenis. PKK didukung dengan cukupnya anggaran dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatannya. Namun kendala yang masih dihadapi PKK Kabupaten Tangerang dalam mencapai tujuannya adalah kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah, belum optimalnya sumber daya manusia dalam hal ini kader PKK. Diharapkan TP – PKK Kabupaten Tangerang perlu lebih meningkatkan kapasitas kader PKK melalui pelatihan-pelatihan, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi.

Kata Kunci : Evaluasi, Gerakan PKK, Kabupaten Tangerang

ABSTRACT

EVALUATION OF 10 MAIN PROGRAMS EMPOWERMENT AND FAMILY WELFARE (PKK) IN IMPROVING FAMILY WELFARE IN TANGERANG REGENCY, BANTEN PROVINCE

By

PUTRI HANDAYANI

The Family Empowerment and Welfare Movement (PKK) is a community organization under the auspices of the Ministry of Home Affairs which aims to improve family welfare. The implementation of the PKK policy as outlined in the 10 main PKK programs in Tangerang Regency is indicated to still have several problems, namely the degradation of the sense of national unity, high school dropout rates, suboptimal food security, the existence of uninhabitable houses and stunting rates that never end. The purpose of this study was to analyze the success of the PKK program and its impact on improving family welfare in Tangerang Regency. The method used was qualitative with a descriptive approach using evaluation indicators from the PKK Movement (2021), namely input, process, output and outcome and family welfare indicators according to Suryani (2023), namely economy, social, health and education. The evaluation results showed that the community felt the impact of 10 programs in improving family welfare, namely in the economy, namely increasing food production at the family level and the existence of Family Income Improvement Efforts (UP2K) in each village. In terms of social aspects, many community groups have been formed such as death associations, jimpitan groups and arisan groups. In the health aspect, it is marked by a decrease in the number of families at risk of stunting from 77,608 cases in 2023 to 51,938 in 2024. In the education sector, PKK has facilitated 3,037 students to catch up on packages and established 500 similar PAUDs. PKK is supported by sufficient budget and facilities from the Regional Government in carrying out its activities. However, the obstacles still faced by PKK Tangerang Regency in achieving its goals are the lack of coordination with the Regional Government, and the suboptimal human resources in this case PKK cadres. It is hoped that TP - PKK Tangerang Regency will need to further increase the capacity of PKK cadres through training, especially in terms of mastery of information technology..

Keywords: Evaluation, PKK Movement, Tangerang Regency

Judul Tesis : **Evaluasi 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten**

Nama Mahasiswa : **Putri Handayani**

NPM : **2226021009**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Syarief Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP
NIP. 19780430 200812 1 001

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001

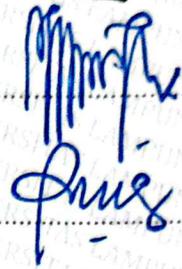
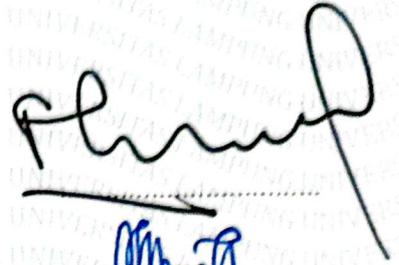
MENGESAIKAN

1. **Tim Penguji**

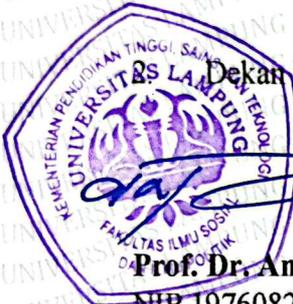
Ketua : Prof. Dr. Syarif Makhya.....

Sekretaris : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos.,M.IP.

Penguji Utama : Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP 19760821 200003 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 16 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "Evaluasi 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten" adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Putri Handayani
NPM. 2226021009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Putri Handayani, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober 1997 dari pasangan Bapak Basri (alm) dan Ibu Masitoh merupakan anak ke – 7 dari 7 bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2021, Fakultas Manajemen Pemerintahan Prodi Manajemen Pemerintahan. Saat ini, penulis melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Lampung dengan program studi Magister Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Manajemen Pemerintahan.

Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Dalam Negeri. penulis telah mengabdikan diri sejak tahun 2021. Penulis memulai karier di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Pada tahun 2022, penulis mendapatkan penugasan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta sampai dengan sekarang. Saat ini penulis menjabat sebagai Analis keuangan pada Bagian Umum Biro Administrasi Pimpinan, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Selama kariernya, penulis telah mengembangkan keahlian di bidang manajemen pemerintahan. Pengalaman ini diperoleh melalui berbagai tugas dan tanggung jawab yang diemban di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Dalam Negeri. Keahlian ini semakin diperkuat dengan studi lanjut di bidang Magister Ilmu Pemerintahan yang penulis tempuh.

MOTTO

“Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapat keberuntungan dan Allah SWT akan menambah panjang umurnya”

(HR. Bukhori)

“Keterbatasan bukanlah halangan, karena hidup adalah perjuangan ”

(Putri Handayani)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya persembahkan tesis ini kepada, Ayahanda (alm) dan Ibunda tercinta.

Ayahanda Basri (Alm) Dan Ibunda Masitoh

Terimakasih telah menghadirkanku didunia ini dan tiada lelah mendidik dan membimbing dengan kasih sayang yang tiada terhingga.

Izinkan karya ini kupersembahkan kepada kalian, semoga menjadi salah satu wujud baktiku untuk memperoleh Ridho orang tua dan keluarga sehingga Allah SWT ridho denganku.

Serta

Almamaterku Tercinta,

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

&

Universitas Lampung (UNILA)

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa penulis telah menyelesaikan naskah tesis dengan judul **“EVALUASI 10 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam kepenulisan naskah tesis sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu dalam prosesnya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti di masa mendatang untuk mengembangkan topik serupa dalam objek yang berbeda.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.S., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung
4. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung sekaligus sebagai Penguji Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran sebagai wujud penyempurnaan penyusunan tesis.

5. Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak membantu penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa studi, serta memberikan masukan, kritik, dan saran secara substansial yang membangun dan bermanfaat dalam penyusunan tesis.
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP sebagai Pembimbing Pendamping yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran secara kepenulisan dan substansial yang bermanfaat dalam penyusunan tesis.
7. Seluruh Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dan Staf Sekretariat yang selalu membantu berbagai hal administrasi dan lainnya selama proses menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Basri (Alm) dan Ibunda Masitoh yang telah memberikan seluruh kasih dan sayang, cinta, doa, dorongan, motivasi, support materiil dan non-materiil dan segalanya dalam hidup penulis dan dalam proses pendidikan hingga sampai dititik ini.
9. Kakanda Muhammad Ridho Ficardo yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil dalam proses penyelesaian studi ini.
10. Seluruh kakak – kakakku tercinta yang selalu mendukung penulis untuk semangat dalam proses penyelesaian studi ini.
11. Seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi terkait topik penelitian secara komprehensif, Ibu Mirasari Andi Ony selaku Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Tangerang, Ketua 1 Tante Aam Satim beserta anggota, Ibu Dirman, Wak Afud, Ibu Tutut, Ibu Topik, Ibu Nurjanah. Ketua 2 Ibu Rismawati Maesyal beserta jajaran, Ibu Nur Ali, Ibu Sri Rudi, Ibu Lina, dr. Umami, Ibu Yetti. Ketua 3 Ibu Wiwin Herry beserta jajaran, Ibu Sri Jarnaji, Ibu Yayat, Ibu Ijut, Pak Zeni, Pak Bambang. Ketua IV Uwak Eny Hendy Sujono beserta jajaran, Komandan Pleton Ibu Yani Deden, Ibu Hotmaruli, Ibu Mukri, Ibu Nugraheni, Pak Kusnadi. Segenap unsur Sekretaris, Ibu utut, Ibu Iip, Ibu Asep Bandar, dan Ibu yeni. Unsur Bendahara, Ibu Dedi, Ibu

Ana, Ibu Ijah, Ibu Ratih dan Ibu Ita. Terimakasih atas kebersamaannya dalam menjalankan seluruh kegiatan PKK di Kabupaten Tangerang.

12. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Tangerang
13. Saudara Kontingen dari IPDN yang terus membersamai sampai jenjang Magister, Prilia Ristanti dan Frida Agustina. Serta Roida Alifa yang selalu membantu dan menjadi tempat bertanya.
14. Saudara Jihan, Inyaw, Pece, Anismut, Bang Arif, Bang Ucup, Kak Yusril yang selalu membersamai di perantauan dan sahabatku Mela yang sedia menemani mencari angin segar.
15. Seluruh rekan – rekan MIP 2022.
16. Kepada Putri Handayani terimakasih telah berjuang menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Ditengah pekerjaan yang luar biasa menyita waktu, tenaga dan pikiran. Bolak – balik Jakarta – Lampung, alhamdulillah senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang lapang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan dan keberkahan atas apa yang sudah diberikan kepada penulis baik semangat, dukungan moril maupun materiil.

Bandar Lampung, Januari 2025

Putri Handayani

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
II. KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Kebijakan Publik	14
2.1.1 Proses Kebijakan Publik.....	19
2.1.2 Evaluasi Kebijakan.....	22
2.2 Pemberdayaan Masyarakat.....	25
2.3 Kesejahteraan Keluarga.....	26
2.4 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.....	27
2.5 Kerangka Pikir.....	31
III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Tipe Penelitian.....	32
3.2 Lokasi Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Penentuan Informan	34
3.5 Jenis dan Sumber Data	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6.1 Analisis Data Sekunder	36
3.6.2 Wawancara (<i>Interview</i>).....	37

3.6.3	Kuisisioner Terbuka	38
3.7	Teknik Analisis Data	39
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Tangerang	41
4.1.1	Penduduk dan Mata Pencaharian.....	43
4.2	Gambaran Umum TP – PKK Kabupaten Tangerang.....	45
4.3	Kebijakan PKK	55
4.3.1	Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.....	55
4.3.2	Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.	59
4.4	Hasil Penelitian Evaluasi 10 Program Pokok PKK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Tangerang.....	61
4.4.1	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	63
4.4.2	Gotong Royong	69
4.4.3	Pangan	75
4.4.4	Sandang	83
4.4.5	Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	84
4.4.6	Pendidikan dan Keterampilan.....	88
4.4.7	Kesehatan	95
4.4.8	Pengembangan Hidup Berkoperasi	105
4.4.9	Kelestarian Lingkungan Hidup.....	107
4.4.10	Perencanaan Sehat	111
4.5	Indikator Evaluasi 10 Program Pokok PKK	116
4.6	Analisis Kebijakan Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kabupaten Tangerang	117
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
5.1	Kesimpulan.....	121
5.2	Saran.....	123
	DAFTAR PUSTAKA.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Prestasi PKK Kabupaten Tangerang	7
Tabel 1.2.	Identifikasi Masalah	9
Tabel 2.1.	Instrumen dan Indikator Evaluasi PKK	25
Tabel 3.1.	Informan	34
Tabel 4.1.	Data Luas dan Jumlah Penduduk per–Kecamatan se–Kabupaten Tangerang	42
Tabel 4.2.	Jumlah Pekerja di Kabupaten Tangerang	45
Tabel 4.3.	Jumlah Kader dan sarana kegiatan PKK Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2022	49
Tabel 4.4.	Data Jumlah Kader dan kelompok program Penghayatan dan Pengamalan pancasila	68
Tabel 4.5.	Data Jumlah Kelompok pada Program Gotong-royong di Kabupaten Tangerang	74
Tabel 4.6.	Data Jumlah Program Pangan di Kabupaten Tangerang	82
Tabel 4.7.	Data Status Kelayakan Rumah di Kabupaten Tangerang.....	87
Tabel 4.8.	Kegiatan pada program pendidikan di PKK Kabupaten Tangerang ...	92
Tabel 4.9.	Data Jumlah Anak Stunting di Kabupaten Tangerang	101
Tabel 4.10.	Data Kelestarian Lingkungan Hidup.....	110
Tabel 4.11.	Data Perencanaan Sehat di Kabupaten Tangerang	112
Tabel 4.12.	Tabel hasil kuisioner evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tahapan Kebijakan Publik.....	20
Gambar 2.2. Kerangka Pikir	31
Gambar 4.1. Struktur Organisasi TP – PKK Kabupaten Tangerang.....	55
Gambar 4.2. Simulasi Bina Keluarga Remaja.	64
Gambar 4.3. Senam Lansia.	65
Gambar 4.4. Senam Remaja.....	66
Gambar 4.5. Kelompok Keagamaan.	72
Gambar 4.6. Aku Hatinya PKK.....	78
Gambar 4.7. Pengelolaan Pangan B2SA.....	79
Gambar 4.8. Kelompok Wanita Tani Kabupaten Tangerang.....	81
Gambar 4.9. Contoh Rumah Sehat Layak Huni.....	86
Gambar 4.10. Program Kejar Paket di Kabupaten Tangerang	90
Gambar 4.11. Kegiatan Keterampilan di Kabupaten Tangerang.....	95
Gambar 4.12. Pelaksanaan Posyandu.....	100
Gambar 4.13. Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).....	103
Gambar 4.14. Lingkungan PHBS.....	109

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Suatu Negara sudah dipastikan mempunyai pemerintah untuk menjalankan kehidupan negaranya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintah juga diartikan sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah. Menurut Budiardjo (2019) menjelaskan bahwa kedudukan pemerintah dalam negara adalah sebagai pelaksana kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif demi mencapai tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sendiri menurut Rasyid (dalam Wulandari, 2023) mempunyai empat fungsi yaitu, fungsi pelayanan (*service*), fungsi pengaturan (*regulating*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi pemberdayaan (*empowerment*) yang semua fungsinya pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Rasyid menekankan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan ini harus dijalankan secara sinergis dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sejalan dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam memaksimalkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan melakukan upaya membuat suatu kebijakan yang menuju pada arah pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud pengamalan terhadap UUD 1945 tersebut, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo membuat Visi Misi, yang salah satunya memprioritaskan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah (APBD) yang fokus dan tepat sasaran. Hal ini

tercantum dalam poin kelima dari visi Presiden Joko Widodo yang menekankan pada point mensejahterakan Indonesia dari daerah pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka menjaga negara kesatuan. Perhatian Pemerintah lewat Nawacita tersebut, diperkuat juga oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dimana sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan percepatan terbangunnya struktur perekonomian yang kuat berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. (Bappenas, 2019).

Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang merupakan suatu inisiatif nasional yang dimulai dari tingkatan masyarakat paling bawah yaitu dimulai dari lingkup keluarga yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan keluarga. PKK bergerak dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Gerakan PKK berperan dalam mendukung program – program pemerintah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia. Gerakan PKK sendiri dijalankan oleh masyarakat dan untuk masyarakat, dan digerakkan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP - PKK) dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri di tingkat pusat, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di masing – masing Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Berawal dari gerakan pemberdayaan masyarakat yang berkembang dari seminar ekonomi rumah tangga yang diselenggarakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tahun 1957. Seminar tersebut merumuskan sepuluh rumusan aspek kehidupan keluarga. Kemudian rumusan ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Dalam Pendidikan Budaya pada saat itu menjadi “10 Kehidupan Keluarga” yang setelahnya ditetapkan sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga, dan diajarkan di sekolah-sekolah dan kelas-

kelas lokal sejak tahun 1961. Pada bulan Mei 1962, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat (PLPM) didirikan di Desa Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk mensosialisasikan sepuluh aspek kehidupan keluarga Pada tahun 1967. Masyarakat di beberapa wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Dieng, Kabupaten Wonosobo, hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, banyak yang menderita *Honga Odeem (HO)* atau Abses Kelaparan Melihat keadaan tersebut, Ibu Isriati Moenadi merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai istri Gubernur Jawa Tengah saat itu dan berinisiatif untuk mendirikan PKK di Jawa Tengah. Dimulai dari tingkat provinsi hingga desa dan daerah Tingkat kecamatan. Melihat keberhasilan PKK di Jawa Tengah, Presiden RI pada saat itu merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri Amir Makhmud agar dibentuk dan dilaksanakannya PKK di daerah-daerah seluruh Indonesia (PKK Tanjab Barat, 2024).

Sebagai salah satu program terbesar dalam skala nasional, PKK telah diatur dalam produk hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017. Dalam Perpres No. 99 Tahun 2017 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang lahir dan berkembang dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, dengan tujuan menciptakan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berakhlak mulia, sejahtera, maju dan mandiri dan memiliki derajat kesehatan yang tinggi, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Tidak hanya berfokus pada aspek sosial ekonomi, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kebijakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diwujudkan dalam bentuk 10 Program pokok PKK yang tercantum dalam Buku hasil Rakernas ke – IX Tahun 2021, yaitu :

1. Program penghayatan dan pengamalan Pancasila, program ini menerapkan nilai - nilai pembentukan dan penanaman karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghayati dan mengamalkan butir – butir pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Program gotong royong yaitu upaya meningkatkan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga masyarakat, dan kelompok masyarakat untuk agar tercipta semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Program pangan yaitu upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya sekitar rumah tangga yang berlandaskan dengan kearifan lokal.
4. Program sandang, yaitu peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri khususnya produk – produk lokal masyarakat setempat sesuai dengan moral budaya bangsa Indonesia.
5. Program perumahan dan tata laksana rumah tangga, yaitu berupa peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah.
6. Program pendidikan dan keterampilan berupa peningkatan kesadaran keluarga dan masyarakat dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
7. Program kesehatan berupa penumbuhan kesadaran terhadap keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keluarga untuk meningkatkan kesehatan dan lingkungan melalui penerapan pola hidup bersih, sehat, dan pola makan seimbang.
8. Program pengembangan kehidupan berkoperasi yaitu berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi.

9. Program kelestarian lingkungan terdiri dari peningkatan kesadaran keluarga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemukiman masyarakat yang sehat.
10. Program perencanaan kesehatan adalah untuk memantapkan dan memperkuat kesadaran keluarga untuk memasukkan perencanaan hidup ke dalam keluarga yang berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Untuk menjalankan kebijakan PKK yang dikenal dengan 10 program pokok PKK, dibentuk 4 (empat) kelompok kerja (pokja) sebagai pengelola kebijakan yang masing – masing mempunyai tugas:

1. Pokja I sebagai pengelola program :
 - a) Penghayatan dan pengamalan Pancasila
 - b) Gotong - royong
2. Pokja II sebagai pengelola program :
 - a) Pendidikan dan keterampilan
 - b) Pengembangan kehidupan berkoperasi
3. Pokja III sebagai pengelola program :
 - a) Pangan
 - b) Sandang
 - c) Perumahan dan tata laksana rumah tangga
4. Pokja IV sebagai pengelola program :
 - a) Kesehatan
 - b) Kelestarian lingkungan hidup
 - c) Perencanaan sehat

Dilihat dari kebijakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui 10 program pokok PKK terlihat jelas bahwa gerakan PKK mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimulai dari tingkatan yang paling kecil yaitu keluarga. Di Kabupaten Tangerang, gerakan ini memainkan peran krusial dalam menguatkan struktur sosial dan ekonomi keluarga serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Banten. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tigaraksa. Kabupaten Tangerang memiliki luas 95.961 Ha atau 959,61 km² yang terbagi menjadi 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Tangerang sebanyak 3.309.365 jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 6, 93% (BPS, 2024). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten masih memiliki banyak tantangan diantaranya persoalan kemiskinan, persoalan lapangan kerja, pertumbuhan penduduk dan ekonomi dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakatnya terkhusus pada Keluarga.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah dengan populasi terpadat dan pertumbuhan yang pesat. Dinamika sosial, ekonomi, dan demografi yang kaya membuat kabupaten ini menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola pertumbuhan yang cepat dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya. Kondisi ini menegaskan urgensi dari implementasi kebijakan PKK sebagai respons terhadap masalah-masalah tersebut, dengan fokus pada bina wilayah sebagai salah satu strategi utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Ode et al., 2022). Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang 2014 – 2023 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan produk lokal dan berdaya saing, pemantapan tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien, meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya, berfungsinya infrastruktur pariwisata (Diskominfo Kab. Tangerang, 2020). Tentunya arah kebijakan ini sangat berhubungan dengan 10 program pokok PKK sebagai mitra pemerintah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang.

Tim Penggerak PKK Kabupaten Tangerang sangat aktif dan berprestasi ditingkat provinsi dan selalu mewakili Provinsi Banten di tingkat nasional. Adapun prestasi – prestasi yang diraih PKK Kabupaten Tangerang Pada tahun 2022 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1. Prestasi PKK Kabupaten Tangerang

No.	Prestasi
1.	Juara Umum Tingkat Provinsi Banten
2.	Juara Pakarti Utama I Lomba Terbaik AKU HATINYA PKK
3.	Juara Pakarti Utama I Lomba GELARI PELANGI
4.	Juara Pakarti Utama I Lomba Terbaik Peduli Stunting
5.	Juara Pakarti Utama II Lomba Terbaik Tertib Dasa Wisma

Sumber : Profil PKK Kabupaten Tangerang, 2024

Tim Penggerak PKK (TP – PKK) Kabupaten Tangerang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Dengan fokus pada peningkatan kapasitas keluarga dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat, PKK berperan penting dalam membangun fondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah ini. PKK tidak hanya sekadar sebuah program, melainkan sebuah gerakan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek kehidupan. Melalui kegiatan di setiap Pokja, TP - PKK di Kabupaten Tangerang berupaya keras untuk memperkuat komunitas lokal (Putri & Syuraini, 2021).

Salah satu strategi utama adalah dengan meningkatkan partisipasi perempuan dan pemuda sampai lansia dalam berbagai program kegiatan. Perempuan dianggap sebagai agen perubahan yang krusial dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memajukan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemuda dipandang sebagai pilar masa depan yang harus didorong untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan PKK tidak hanya berfokus pada aspek sosial-ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan penguatan budaya lokal. Ditengah tantangan global terkait perubahan iklim dan degradasi lingkungan, PKK mempromosikan praktik-praktik yang ramah lingkungan serta berkelanjutan. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemanfaatan energi terbarukan, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang rentan terhadap degradasi.

Gerakan PKK telah ditetapkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang . Dengan

mengintegrasikan nilai-nilai kebijakan PKK ke dalam setiap keputusan dan inisiatif pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat setempat. Ini termasuk peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan keberlanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan PKK di Kabupaten Tangerang mencerminkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan berkelanjutan yang holistik. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda sampai lansia, PKK tidak hanya menjadikan mereka sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan yang berkelanjutan. Dengan terus mengembangkan dan menguatkan pendekatan ini. Diharapkan Kabupaten Tangerang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mencapai kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya. Namun demikian, implementasi kebijakan PKK di Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari berbagai masalah dan tantangan. Masalah infrastruktur yang terbatas, akses terhadap sumber daya yang terbatas, dan perubahan sosial budaya merupakan beberapa diantaranya. Tantangan-tantangan ini tentunya mempengaruhi efektivitas kebijakan PKK yang dituangkan dalam 10 program pokok PKK dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Berkenaan dengan penjelasan diatas, berikut adalah data terkait identifikasi permasalahan 10 Program PKK yang ditemui pada saat kegiatan bina wilayah di Kabupaten Tangerang :

Tabel 1.2. Identifikasi Masalah

No.	Identifikasi Masalah	Keterkaitan dengan 10 Program Pokok PKK
1.	Degradasi rasa kesatuan dan persatuan kesatuan bangsa yang ditandai dengan semakin merebaknya ujaran kebencian dan permasalahan mengenai isu SARA	Penghayatan dan pengamalan pancasila
2.	Merebaknya Penggunaan dan penyalahgunaan narkoba dan Praktik kekerasan pada anak dan perempuan	Gotong royong
3.	Rendahnya minat baca dan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi, masih banyaknya Masyarakat yang buta huruf dan putus sekolah	Pendidikan dan keterampilan
4.	Kurangnya manajemen dalam pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan rendahnya partisipasi dalam kehidupan berkoperasi	Pengembangan kehidupan berkoperasi
5.	Belum terlaksananya program ketahanan pangan (<i>food security</i>) berbasis Masyarakat secara optimal, dan Masyarakat belum secara optimal memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber cadangan pangan dan gizi keluarga	Pangan
6.	Belum banyak Masyarakat yang mempunyai kesadaran untuk menggunakan produk sandang lokal	Sandang
7.	Masih adanya rumah kurang sehat layak huni	Perumahan dan tata laksana rumah tangga
8.	Angka stunting yang tidak pernah habis serta masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Kesehatan
9.	Meningkatnya kasus kerusakan lingkungan	Kelestarian lingkungan hidup
10.	Rendahnya keikutsertaan program KB bagi pasangan baik pria maupun wanita usia subur	Perencanaan sehat

Sumber : Laporan TP – PKK Kabupaten Tangerang, 2024

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat dijelaskan bahwa 10 Program Pokok PKK masih memiliki berbagai tantangan baik dalam bidang kesehatan, lingkungan hidup, pengamalan nilai-nilai Pancasila, sandang pangan, maupun pendidikan. Isu – isu utama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan

keluarga dan menjadi fokus perhatian PKK Kabupaten Tangerang yaitu permasalahan kesehatan dan pendidikan. Dimana permasalahan kesehatan yang dinaungi oleh pokja IV TP – PKK mempunyai tugas penting untuk membantu menurunkan angka stunting dan peningkatan gizi balita di Kabupaten Tangerang. Hal ini dikarenakan jumlah anak stunting yang terus bertambah, hingga bulan Juni tahun 2024 jumlahnya mencapai 17.154 balita dari sebelumnya 6.000 balita (Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2024). Sementara di bidang Pendidikan yang dinaungi oleh Pokja II PKK mempunyai tugas dalam membantu penurunan angka buta huruf yang jumlahnya 14.788 orang (Laporan TP – PKK Kabupaten Tangerang, 2024). Selain itu juga PKK melakukan pendataan jumlah anak yang putus sekolah, yang kemudian nanti akan di fasilitasi untuk kejar paket. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu pemerintah Kabupaten Tangerang dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka dipandang perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK, pada pasal 56 ayat (2) disebutkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menggunakan instrument PKK yang dimuat dalam buku petunjuk teknis (Juknis) Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.

Secara keseluruhan, latar belakang evaluasi kebijakan Gerakan PKK di Kabupaten Tangerang merupakan landasan yang penting dalam memahami konteks, tujuan, metode, permasalahan, evaluasi sebelumnya, ruang lingkup, dan rasionalisasi evaluasi kebijakan ini. Dengan mengintegrasikan semua aspek tersebut, evaluasi yang komprehensif dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dampak kebijakan PKK terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk memperbaiki implementasi kebijakan di tingkat

lokal, tetapi juga untuk mengembangkan model yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan tantangan dan kondisi masing – masing daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2022) membuktikan Pemberdayaan ekonomi rumah tangga adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensi-potensi atau kemampuan ibu rumah tangga yang mereka miliki. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi program kerja PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga di Desa Ujungbatu Timur Kabupaten Rokan Hulu bahwa program pemberdayaan ekonomi sudah berjalan dengan baik.

Dalam penelitian Herlina (2019) yang berjudul “Fungsi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Di Desa Maasawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran” ditemukan hambatan dalam meningkatkan pemberdayaan Perempuan yaitu ada sebagian ibu - ibu yang kurang memperhatikan penyuluhan rendahnya SDM yang dimiliki oleh PKK, tidak semua kader memahami mengenai program pokok PKK, kesiapan kader PKK untuk menyalurkan keterampilannya, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh PKK, dana yang kurang, belum terealisasinya program pokok PKK, kurangnya fasilitas yang diberikan oleh PKK, keterbatasan jumlah anggota PKK, PKK yang memiliki kesibukan, keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh PKK.

Menurut penelitian Mirnawati (2018) yang berjudul “Peran PKK dalam Peningkatan perekonomian masyarakat desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terhadap peningkatan ekonomi masyarakat” penelitian ini melihat bahwa peran PKK dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan pemerolehan pengetahuan, keterampilan akan tetapi lebih jauh lagi adalah memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik individu maupun kelompok.

Berdasarkan penelitian Natasya (2024) yang berjudul “Peranan Tim Penggerak PKK Dalam Menggerakkan Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan yang dijalankan oleh tim penggerak PKK Desa Krawang Sari dalam menggerakkan kesadaran hidup bersih dan sehat telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan dalam bidang kesehatan, perencanaan kesehatan, dan kelestarian lingkungan dalam bentuk sosialisasi dan praktik.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan Arma (2016) yang berjudul “Evaluasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Kotawaringin Barat” tidak menggunakan teori evaluasi. Penelitian ini mengevaluasi program PKK melalui rencana yang sudah ditetapkan dan bagaimana pelaksanaan program pokok PKK. Menurut penelitian ini program PKK di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari pemerintah daerah.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini akan lebih menggali secara keseluruhan bagaimana Gerakan PKK Kabupaten Tangerang melalui 10 program pokok PKK dapat mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tangerang. Tidak hanya berfokus pada satu pokja, tetapi akan diidentifikasi dan ditemukan permasalahan – permasalahan yang selama ini masih dihadapi oleh seluruh pokja yang ada di PKK Kabupaten Tangerang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Tangerang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah program PKK telah berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tangerang?

2. Apa dampak program PKK terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tangerang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis program PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tangerang
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak program PKK terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tangerang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan penelitian lanjutan terkait dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perumusan kebijakan publik dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui PKK
- b. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam menjalankan kebijakan PKK melalui 10 program pokok PKK.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan. Kebijakan publik merupakan aspek krusial dalam pemerintahan modern, memainkan peran penting dalam menentukan arah dan kualitas kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, definisi dan pemahaman tentang kebijakan publik terus berkembang. Menurut Birkland dalam bukunya "*An Introduction to the Policy Process*" (5th edition, 2022), kebijakan publik adalah "serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah, seringkali melalui berbagai lembaga dan proses, untuk mengatasi masalah atau kebutuhan publik. Kebijakan publik mencakup keputusan yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat dan dikeluarkan oleh otoritas yang sah." Sedangkan menurut Dye (2023) mengatakan "*whatever government choose to do or not to do*" yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan dan yang tidak dilakukan. Ini mencakup semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan masalah-masalah publik.

Kebijakan publik adalah alat penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi kebijakan publik terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Proses pembuatan kebijakan yang sistematis dan partisipatif sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Namun, berbagai tantangan modern seperti kompleksitas masalah sosial, teknologi, partisipasi publik, globalisasi, dan ketidakpastian politik menuntut pendekatan yang inovatif dan

adaptif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik dan tantangannya, pembuat kebijakan dapat lebih efektif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat.

Menurut Hamdi (2014), kebijakan publik merupakan pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan negara. Hamdi mengidentifikasi 3 karakter utama dalam kebijakan publik yaitu:

1. Setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu memiliki tujuan, yakni untuk menyelesaikan masalah publik. Kebijakan publik yang baik akan selalu mengandung makna sebagai suatu upaya masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Setiap kebijakan publik selalu merupakan pola dari suatu tindakan yang terjabarkan dalam program dan kegiatan. Oleh karena itu, kebijakan publik secara lebih konkret dapat diamati dalam wujud perencanaan, program dan kegiatan.
3. Setiap kebijakan publik selalu termaktub didalam hukum positif. Keberadaan suatu sistem politik ataupun sistem pemerintahan akan selalu menggambarkan dua keistimewaan. Pertama, pemerintahan merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat. Kedua, pemerintahan juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada para pelanggarnya

Kemudian Midgley (2021) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan secara umum dalam kategori berikut:

1. Kebijakan distributif

Kebijakan distributif adalah jenis kebijakan publik yang bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya, manfaat, atau layanan kepada individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Fokus utama dari kebijakan ini adalah mengatur alokasi sumber daya secara adil dan merata untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Misalnya, dalam konteks

pendidikan, kebijakan distributif mungkin mencakup pemberian beasiswa kepada pelajar dari keluarga kurang mampu untuk memastikan mereka memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Begitu pula, dalam kesehatan, kebijakan distributif dapat berupa program subsidi kesehatan untuk kelompok rentan. Tujuan utama dari kebijakan distributif adalah mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka melalui alokasi yang lebih adil dari sumber daya yang tersedia.

2. Kebijakan redistributif

Kebijakan redistributif adalah pendekatan dalam kebijakan sosial yang berfokus pada pergeseran sumber daya dan kekayaan dari kelompok masyarakat yang lebih kaya ke kelompok yang lebih miskin dengan tujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan kelompok yang kurang beruntung. Midgley menekankan bahwa kebijakan redistributif tidak hanya melibatkan transfer langsung dari kelompok kaya ke kelompok miskin tetapi juga mencakup penguatan sistem sosial yang mendukung inklusi dan akses yang lebih adil terhadap peluang dan sumber daya. Kebijakan ini bisa meliputi berbagai bentuk intervensi seperti program tunjangan sosial, subsidi, dan layanan publik yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi hidup dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Dengan cara ini, kebijakan redistributif berupaya untuk menciptakan struktur sosial yang lebih adil dan mengurangi ketidakadilan ekonomi yang dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Kebijakan regulatif

Kebijakan regulatif adalah jenis kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengatur atau mengendalikan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat dengan menetapkan aturan, standar, dan regulasi. Dalam konteks ini, kebijakan regulatif berfokus pada pembuatan dan penegakan aturan hukum yang mengarahkan tindakan dan perilaku untuk mencapai tujuan sosial tertentu dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma

yang diinginkan. Midgley menyatakan bahwa kebijakan regulatif sering kali digunakan untuk menangani masalah sosial yang memerlukan intervensi langsung, seperti perlindungan konsumen, regulasi pasar tenaga kerja, atau standar kesehatan dan keselamatan. Contoh kebijakan regulatif termasuk undang-undang perlindungan lingkungan yang mengatur emisi polutan, atau peraturan yang mengatur praktik bisnis untuk melindungi hak-hak pekerja dan konsumen. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih teratur dan adil dengan meminimalkan perilaku yang merugikan dan mendorong tindakan yang mendukung kesejahteraan umum.

4. Kebijakan konstitusi

Kebijakan konstitusi berhubungan dengan pembuatan dan pengaturan kerangka hukum dan struktur dasar yang menentukan bagaimana negara dan lembaga-lembaganya berfungsi. Kebijakan ini berkaitan dengan penyusunan dan penegakan konstitusi, yang merupakan dokumen hukum tertinggi yang menetapkan prinsip-prinsip dasar, hak-hak individu, dan pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Midgley menjelaskan bahwa kebijakan konstitusi memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta dalam membentuk sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Konstitusi menetapkan aturan dan prosedur yang memandu pengambilan keputusan dan penegakan hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak dasar bagi semua warga negara. Dengan demikian, kebijakan konstitusi bertujuan untuk menciptakan kestabilan politik, keadilan sosial, dan legitimasi pemerintahan yang kuat.

5. Kebijakan proteksi sosial

Kebijakan proteksi sosial adalah pendekatan yang dirancang untuk melindungi individu dan keluarga dari risiko sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada kelompok-kelompok rentan atau yang mengalami kesulitan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan, pengangguran, atau kondisi kesehatan yang

buruk. Midgley menjelaskan bahwa kebijakan proteksi sosial mencakup berbagai bentuk intervensi, seperti program bantuan sosial, tunjangan pengangguran, subsidi kesehatan, dan jaminan sosial. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses terhadap sumber daya dasar dan layanan yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas hidup yang layak. Kebijakan proteksi sosial berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial, serta mendorong inklusi sosial dan kesempatan yang lebih adil. Midgley menekankan bahwa proteksi sosial tidak hanya berfokus pada bantuan finansial, tetapi juga pada penyediaan dukungan sosial dan kesempatan yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

Berdasarkan jenis – jenis kebijakan yang telah dijelaskan diatas, Gerakan PKK dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebijakan proteksi sosial karena perannya yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Proteksi sosial sendiri adalah serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan memberikan dukungan kepada keluarga dalam bentuk tunjangan, layanan sosial, dan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial. PKK beroperasi dengan memberikan perlindungan sosial secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai program yang berfokus pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Contohnya, dalam program-program seperti Posyandu dan pemberian pendidikan kesehatan, PKK memberikan layanan yang mendukung kesehatan ibu dan anak, yang merupakan elemen penting dari proteksi sosial. Selain itu, PKK juga mendukung peningkatan pendapatan keluarga melalui pelatihan keterampilan dan usaha kecil, yang membantu mengurangi kerentanan ekonomi. Peran PKK dalam konteks proteksi sosial juga dapat dilihat dari upayanya dalam meningkatkan ketahanan keluarga terhadap risiko sosial, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan yang terstruktur

dalam 10 Program Pokok PKK. Program-program ini mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan hidup, yang semuanya berkontribusi pada terciptanya kondisi sosial yang lebih aman dan stabil bagi keluarga di Indonesia

2.1.1 Proses Kebijakan Publik

Dalam sebuah pengambilan sebuah kebijakan publik sudah seharusnya melalui sebuah proses yang mengindahkan berbagai macam pertimbangan untuk mencapai tujuan dari diambilnya kebijakan tersebut. Birkland (2022) menjabarkan beberapa tahapan dalam proses pemilihan kebijakan publik:

a. Identifikasi Masalah

Tahapan pertama adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang menjadi fokus perhatian publik atau pemerintah. Tahapan ini melibatkan pengumpulan data dan analisis untuk memahami akar masalah dan urgensi untuk diberikan respons dalam bentuk kebijakan publik.

b. Perumusan Agenda

Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda publik, yaitu mengarahkan perhatian publik atau politik untuk membahas masalah tersebut.

c. Analisis Kebijakan Alternatif

Proses ini melibatkan penyusunan berbagai opsi kebijakan yang dapat mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Setiap opsi kebijakan dievaluasi berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan penerimaan politik.

d. Adopsi Kebijakan

Tahapan adopsi melibatkan pembuatan keputusan resmi oleh pemerintah atau badan legislatif untuk mengadopsi salah satu dari opsi kebijakan yang telah disusun.

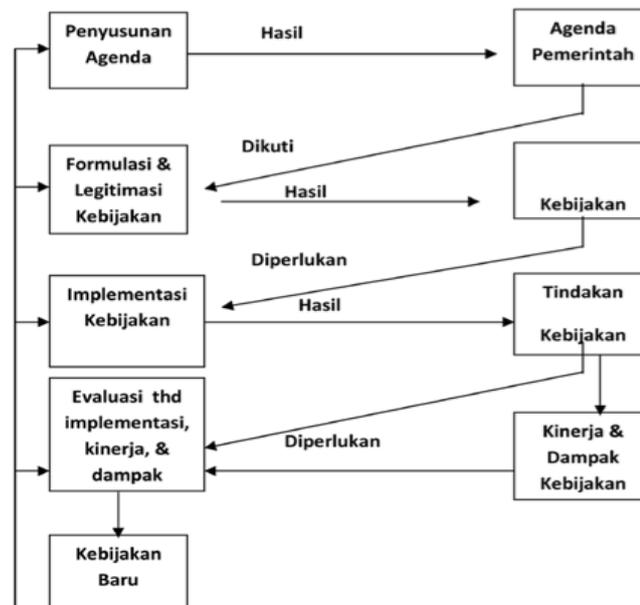
e. Implementasi Kebijakan

Setelah kebijakan diadopsi, langkah berikutnya adalah mengimplementasikannya melalui program-program dan lembaga-lembaga yang relevan dalam pemerintahan.

f. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dilakukan secara teratur untuk menilai dampak kebijakan terhadap masalah yang diidentifikasi serta untuk memastikan bahwa kebijakan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi atau kebutuhan baru.

Menurut pandangan Ripley dalam Taufiqurokhman (2014) Tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Tahapan Kebijakan Publik

Sumber : Taufiqurokhman, (2014)

Berdasarkan gambar diatas, kebijakan publik dibagi kedalam beberapa tahap. Adapun tahap – tahap kebijakan publik menurut Ripley adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyusunan Agenda

Tahap pertama dalam proses kebijakan publik adalah penetapan agenda. Pada tahap ini, isu atau masalah yang memerlukan perhatian pemerintah atau lembaga publik diidentifikasi dan ditempatkan

dalam agenda kebijakan. Penetapan agenda dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan masyarakat, advokasi kelompok kepentingan, perubahan sosial atau ekonomi, serta perhatian media. Isu-isu yang berhasil masuk dalam agenda biasanya menjadi fokus perumusan kebijakan di tahap selanjutnya.

2. Tahap Perumusan Kebijakan

Setelah masalah diidentifikasi, tahap berikutnya adalah perumusan kebijakan. Ini melibatkan proses merancang solusi atau rencana tindakan untuk menanggapi isu yang telah ditetapkan dalam agenda. Perumusan kebijakan mencakup analisis mendalam tentang penyebab masalah, pilihan kebijakan yang tersedia, serta pertimbangan politik dan ekonomi yang mempengaruhi pilihan tersebut. Pada tahap ini, tujuan dan strategi kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah didefinisikan dengan jelas.

3. Tahap Implementasi Kebijakan

Setelah kebijakan dirumuskan, tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Ini melibatkan penerapan rencana tindakan yang telah dirumuskan ke dalam kebijakan yang dapat dilaksanakan di lapangan. Implementasi memerlukan koordinasi antarinstansi, alokasi sumber daya yang memadai, serta komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4. Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap terakhir dalam siklus kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis terhadap pencapaian tujuan kebijakan, serta penilaian terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan kebijakan, mengidentifikasi area perbaikan, serta untuk membuat rekomendasi kebijakan di masa depan.

2.1.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dalam konteks ilmu pengetahuan dan manajemen sering didefinisikan secara luas, terutama dalam bidang kebijakan publik dan penelitian. Secara umum, evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai nilai atau kualitas suatu objek, program, atau kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tyler dalam Akbar & Mohi. (2018) menyatakan bahwa *Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized*, Tyler mengungkapkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat terealisasi. Menurut Jones dalam Agustino (2019), menjelaskan evaluasi adalah kegiatan mengevaluasi manfaat program pemerintah yang sangat berbeda dalam spesifikasi sasaran, teknik pengukuran, metode analisis, format yang direkomendasikan, dan lain-lain. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi kegunaan suatu kebijakan atau program pemerintah, termasuk spesifikasi sasarannya, teknik pengukurannya, metode analisisnya, dan rekomendasi yang dihasilkan. Pengertian evaluasi ini menekankan pentingnya pendekatan sistematis, menggunakan metodologi yang tepat, dan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan dalam mengevaluasi program atau kebijakan. Evaluasi memberikan wawasan yang berharga dalam memahami efektivitas suatu intervensi atau kebijakan, serta memberikan dasar untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan.

Penilaian dalam evaluasi dapat bersifat netral, positif, negatif atau merupakan gabungan dari positif dan negatif. Saat sesuatu dievaluasi, maka biasanya akan diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi tersebut. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian

tujuan dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan suatu kebijakan atau program di masa yang akan datang.

Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn dalam Handoyo (2012) yaitu :

1. Efektifitas (*effectiveness*)

Mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Ini mencakup penilaian apakah hasil yang diinginkan telah tercapai dan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil memecahkan masalah yang dihadapi.

2. Efisiensi (*efficiency*)

Mengacu pada hubungan antara input dan output, yaitu bagaimana sumber daya (seperti waktu, uang, dan tenaga kerja) digunakan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Kebijakan yang efisien adalah kebijakan yang meminimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil maksimal.

3. Kecukupan (*adequacy*)

Menilai apakah kebijakan tersebut telah mengatasi masalah yang ada secara menyeluruh. Ini berarti kebijakan harus mampu memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah yang menjadi targetnya.

4. Pemerataan (*equity*)

Kriteria yang mengukur sejauh mana kebijakan dapat menanggapi kebutuhan, preferensi, dan tuntutan dari masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat.

5. Responsivitas (*responsiveness*)

Indikator ini mengukur sejauh mana penyelenggara kebijakan atau layanan mampu merespons kebutuhan dan harapan masyarakat secara tepat waktu dan sesuai. Responsivitas mencakup aspek kecepatan tanggapan terhadap permintaan atau keluhan, kesesuaian dan kualitas tanggapan yang diberikan, serta aksesibilitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau memperoleh

informasi. Evaluasi terhadap responsivitas ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan atau layanan yang diberikan benar-benar efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan *dan peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang*.

6. Ketepatan (*appropriateness*)

Mengacu pada kesesuaian antara masalah yang dihadapi dengan solusi yang ditawarkan oleh kebijakan. Ini mencakup penilaian apakah kebijakan yang diterapkan adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah yang ada.

Dengan menggunakan kriteria-kriteria ini, Dunn memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi kebijakan publik. Evaluasi yang mendalam dan menyeluruh menggunakan kriteria ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan yang diterapkan, serta memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan di masa depan.

Dalam buku petunjuk teknis Gerakan PKK yang merupakan hasil dari Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) ke – IX, dijelaskan bahwa Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan kegiatan dan dilakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun. Hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan gerakan PKK menjadi bahan masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun mendatang. Pelaksanaan Evaluasi terhadap 10 Program Pokok PKK dilakukan melalui instrumen dan indikator yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Instrumen dan Indikator Evaluasi PKK

No.	Instrumen	Indikator
1.	Masukan (<i>Input</i>)	Dukungan kebijakan (misalnya dukungan anggaran, dukungan penerbitan surat keputusan, dan sebagainya), pelaksanaan kegiatan, jumlah sumber daya, SDM dan lainnya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
2.	Proses	Visi, Misi, tujuan, dan sasaran
3.	Keluaran (<i>Output</i>)	Kinerja seperti peningkatan yang positif dalam jangka menengah dan jangka panjang.
4.	Hasil (<i>Outcome</i>)	Tingkat keberhasilan dari kegiatan yang positif, manfaat, dan dampak kegiatan 10 Program Pokok PKK

Sumber : Juknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK (2021)

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan salah satu dari empat fungsi pemerintah. Menurut Bharati (2023), ia menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat agar mereka mampu mandiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Proses pemberdayaan ini mencakup pendidikan, pelatihan, dan peningkatan akses ke sumber daya ekonomi dan sosial. Bharati menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pemberdayaan, dengan alasan bahwa akses terhadap informasi dan teknologi dapat membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya pendekatan partisipatif dalam proses pemberdayaan, dimana masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek yang aktif dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program pembangunan.

Menurut Zubaidah (2022) menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan melibatkan upaya untuk memberikan akses yang lebih besar terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial dan

ekonomi. Zubaidah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam mendukung inisiatif pemberdayaan, serta pentingnya evaluasi dan monitoring untuk memastikan bahwa program-program pemberdayaan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang berfokus pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.3 Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga harus dipahami melalui pendekatan holistik yang mencakup berbagai dimensi yang saling berhubungan. Menurut Suryani (2023) kesejahteraan keluarga tidak dapat dilihat hanya dari satu aspek saja, seperti ekonomi, tetapi harus mencakup lima dimensi utama yaitu ekonomi, sosial, psikologis, pendidikan, dan kesehatan.

a. Ekonomi

Pentingnya pendapatan yang stabil serta kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan akses terhadap pekerjaan yang layak sebagai faktor utama dalam mencapai kesejahteraan. Aspek ekonomi dapat dilihat dengan stabilitas pendapatan, kepemilikan asset, dan kemampuan untuk menghadapi krisis finansial.

b. Sosial

Indikator sosial mengacu pada hubungan sosial dalam keluarga serta hubungan dengan masyarakat yang lebih luas. Ini mencakup tingkat partisipasi dalam kegiatan komunitas, jaringan sosial, dan dukungan yang tersedia dari lingkungan sekitar. Kehidupan sosial yang sehat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana

anggota keluarga saling membantu dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan.

c. Kesehatan

Kesejahteraan kesehatan mencakup akses ke layanan kesehatan yang memadai, status kesehatan fisik dan mental, serta kebiasaan hidup sehat dalam keluarga. Kesehatan yang baik memungkinkan anggota keluarga untuk produktif dalam pekerjaan dan pendidikan, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Upaya pencegahan seperti imunisasi, pola makan seimbang, dan olahraga teratur adalah bagian dari indikator kesehatan yang baik.

d. Pendidikan

Indikator pendidikan meliputi akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh anggota keluarga, terutama anak-anak. Pendidikan yang baik memberikan fondasi untuk masa depan yang lebih cerah, membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih baik, dan memperkuat kemampuan berpikir kritis serta pengambilan keputusan. Selain itu, pendidikan orang tua juga mempengaruhi keputusan keluarga terkait kesehatan, ekonomi, dan lingkungan sosial

2.4 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam struktur pemerintahan, PKK dinaungi oleh Direktorat Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri. PKK merupakan organisasi masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan masyarakat di tingkat desa yang merupakan tugas utama dari Ditjen Bina Pemdes yaitu mengoordinasikan, membina, dan mengembangkan desa serta masyarakat desa dalam berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Gerakan PKK memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan masyarakat, terutama di tingkat desa, maka pengawasan dan pembinaannya berada di bawah Ditjen Pemdes Kemendagri. Ini memastikan bahwa program-program PKK selaras dengan kebijakan pembangunan desa secara nasional, termasuk dalam hal pemberdayaan ekonomi, peningkatan

kualitas hidup, dan pengembangan potensi masyarakat desa. Gerakan PKK pada hakekatnya merupakan Gerakan Masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Melalui Gerakan PKK diharapkan peranserta aktif segenap lapisan masyarakat dalam Pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan pemerataan dapat terwujud. Gerakan PKK dituntut untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku, kemandirian pribadi, keluarga maupun Masyarakat, agar tidak salah salam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi terus – menerus.

Secara keseluruhan, PKK berfungsi sebagai agen perubahan yang memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan komunitas dalam mengatasi tantangan hidup. Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keiuarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui berbagai program yang komprehensif. Menurut Eko (2010), PKK merupakan salah satu gerakan pemberdayaan masyarakat yang efektif karena melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas, terutama kaum perempuan. Eko menekankan bahwa PKK tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan keterampilan individu yang berkontribusi padapembangunan komunitas secara keseluruhan. Sunarti (2013) menambahkan bahwa PKK memainkan peran penting dalam ketahanan keluarga. Sunarti menyebutkan bahwa program-program PKK yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga membantu menciptakan keluarga yang lebih mandiri dantanggung dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Selanjutnya Thoha (2015) melihat PKK sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Thoha menegaskan bahwa dengan melibatkan masyarakat secara langsung, PKK mampu menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam memajukan kesejahteraan komunitas. Dalam perspektif kesehatan, Nila Moeloek (2017) menekankan pentingnya peran PKK dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Moeloek menggarisbawahi bahwa program-program PKK yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular, dan peningkatan gizi keluarga sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, Sumarlin (2018) menganggap PKK sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Sumarlin menjelaskan bahwa melalui program-program seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil, PKK membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Secara keseluruhan, PKK dipandang oleh para ahli sebagai gerakan yang holistik dan integratif, yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga sosial, pendidikan, dan kesehatan. PKK berperan penting dalam menciptakan keluarga yang mandiri, tangguh, dan sejahtera, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan komunitas mereka. Gerakan ini telah terbukti mampu membawa perubahan positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, menjadikannya sebagai salah satu upaya pemberdayaan yang paling berhasil di Indonesia.

Korelasi antara pemberdayaan masyarakat yang merupakan tugas dari pemerintah daerah dan Gerakan PKK terletak pada peran PKK sebagai motor penggerak dalam proses pemberdayaan tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai korelasi ini:

1. Penguatan Keluarga sebagai Inti Masyarakat

PKK berfokus pada keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Melalui program-programnya, PKK memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, baik dari segi ekonomi,

pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Ketika keluarga menjadi lebih kuat dan mandiri, komunitas secara keseluruhan juga menjadi lebih berdaya.

2. Peningkatan Kapasitas Individu dan Komunitas

PKK mengadakan pelatihan, penyuluhan, dan kegiatan edukatif yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Misalnya, pelatihan keterampilan usaha bagi ibu rumah tangga atau penyuluhan tentang gizi dan kesehatan bagi keluarga. Ini membantu masyarakat untuk lebih mandiri dan mampu menghadapi tantangan kehidupan.

3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga

Salah satu fokus PKK adalah mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di tingkat keluarga. Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga tetapi juga mendorong ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja di komunitas.

4. Penggerak Partisipasi Sosial

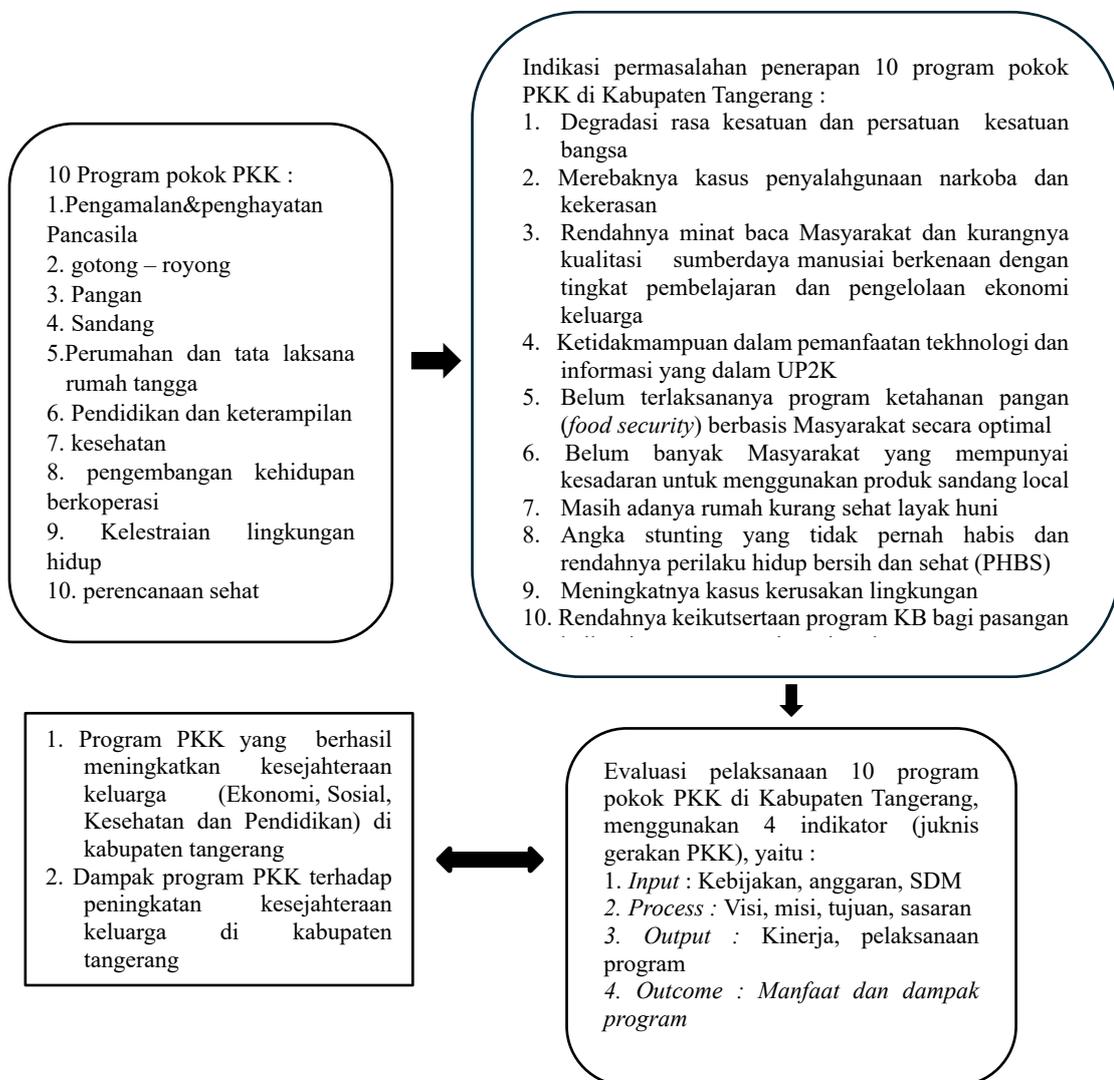
PKK mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti gotong royong, pengelolaan lingkungan, dan kegiatan kesehatan. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan lokal.

5. Peran Perempuan dalam Pemberdayaan

PKK sangat menekankan peran perempuan dalam proses pemberdayaan. Dengan memberikan pelatihan dan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif, PKK membantu meningkatkan status dan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Ini sangat penting dalam menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini mengarahkan peneliti untuk mencari data dan informasi untuk mengevaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan aturan evaluasi yang sudah ditetapkan dalam juknis tata kelola kelembagaan Gerakan PKK yaitu *Input*, *Process*, *Output*, dan *outcome*. Berikut gambaran kerangka pikir dalam Evaluasi Kebijakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Melalui Kegiatan Bina Wilayah di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten :



Gambar 2.2. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan tujuan untuk mengevaluasi program PKK apakah sudah berhasil dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya di Kabupaten Tangerang. Creswell (2021) menekankan pentingnya deskripsi yang kaya dan detail dalam penelitian kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan kompleksitas dari pengalaman individu atau kelompok yang diteliti. Ini membuat pendekatan kualitatif deskriptif sangat berguna dalam situasi dimana pemahaman mendalam tentang konteks atau pengalaman partisipan diperlukan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Tangerang yang merujuk kepada lokasi dimana peneliti menjalankan studi, khususnya untuk mengamati fenomena atau peristiwa yang sedang berlangsung pada objek yang sedang diselidiki, dengan tujuan untuk mengumpulkan data penelitian yang akurat dan relevan (Moleong, 2019). Dalam penelitian ini, pemilihan lokasi telah disengaja (*purposive*), yaitu pada Kantor PKK Kab. Tangerang yang melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP - PKK Kecamatan dalam pelaksanaan program.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting dalam penelitian guna membatasi masalah yang hendak diteliti meskipun bersifat sementara dan terus berkembang sewaktu penelitian. Fokus penelitian pada penelitian kualitatif berdasarkan realitas di lapangan yang bertujuan untuk memahami dan mendalami penelitian yang dilakukan secara terfokus (Sugiyono, 2023). Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan menggunakan 4 indikator dari petunjuk teknis tata kelola kelembagaan gerakan PKK sebagaimana telah tercantum dalam PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2020 tentang pelaksanaan gerakan PKK, dimana didalamnya terdapat 4 instrumen yaitu :

1. *Input*, indikatornya seperti dukungan kebijakan (misalnya dukungan anggaran, dukungan penerbitan surat keputusan, dan sebagainya), pelaksanaan kegiatan, jumlah sumber daya (SDM).
2. *Process*, indikatornya Visi, Misi, tujuan, dan sasaran.
3. *Output*, indikatornya kinerja seperti peningkatan yang positif dalam jangka menengah dan jangka panjang.
4. *Outcome*, indikatornya tingkat keberhasilan dari kegiatan yang positif, manfaat, dan dampak kegiatan 10 Program Pokok PKK.

Untuk indikator kesejahteraan keluarga menggunakan lima indikator menurut Suryani (2023) yaitu :

1. Ekonomi, kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar dan akses terhadap pekerjaan yang layak.
2. Sosial, mencakup Tingkat partisipasi dalam Masyarakat dan jaringan sosial.
3. Kesehatan, akses ke layanan kesehatan yang memadai, status kesehatan fisik dan mental, serta kebiasaan hidup sehat dalam keluarga.
4. Pendidikan, meliputi akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh anggota keluarga.

3.4 Penentuan Informan

Penentuan informan merupakan langkah krusial dalam penelitian kuantitatif yang mempengaruhi kedalaman dan validitas hasil penelitian. Menurut Saldana (2016) seorang ahli metodologi kualitatif terkemuka, penentuan informan harus melibatkan proses penyeleksian yang hati-hati untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang dapat memberikan wawasan yang mendalam dan relevan terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam penentuan informan untuk penelitian ini, digunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* melibatkan pemilihan informan atau narasumber dengan tujuan yang spesifik sesuai dengan tema penelitian, berdasarkan keyakinan bahwa individu tersebut memiliki informasi yang relevan dengan aspek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait dengan Gerakan PKK, serta memiliki kapabilitas untuk memberikan wawasan mengenai pelaksanaan 10 program pokok PKK di Kabupaten Tangerang. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1. Informan

No.	Informan	Jabatan	Keterangan
1.	Ny. Mirasari Andi Ony	Pj. Ketua TP – PKK Kabupaten Tangerang	Penanggungjawab seluruh kegiatan PKK di Kabupaten Tangerang
2.	Ny. Ade Sudirman	Ketua Pokja I TP – PKK Kabupaten Tangerang	Penanggungjawab Pokja I ; Penghayatan dan pengamalan Pancasila, Gotong royong
3.	Ny. Noor Ali	Ketua Pokja II TP – PKK Kabupaten Tangerang	Penanggungjawab Pokja II ; Pendidikan dan Keterampilan, Kehidupan berkoperasi
4.	Ny. Herlina	Anggota Pokja II TP – PKK Kabupaten Tangerang	Pelaksana kegiatan bidang Pendidikan dan Keterampilan, Kehidupan berkoperasi
5.	Ny. Yetti Haryati	Anggota Pokja II TP – PKK Kabupaten Tangerang	Pelaksana kegiatan bidang Pendidikan dan Keterampilan, Kehidupan berkoperasi
6.	Ny. Umami	Anggota Pokja II TP – PKK Kabupaten Tangerang	Pelaksana kegiatan bidang Pendidikan dan Kehidupan berkoperasi

No.	Informan	Jabatan	Keterangan
			Keterampilan, Kehidupan berkoperasi
7.	Ny. Sri Rudi	Anggota Pokja II TP – PKK Kabupaten Tangerang	Pelaksana kegiatan bidang Pendidikan dan Keterampilan, Kehidupan berkoperasi
8.	Ny. Sri Jarnaji	Ketua Pokja III TP – PKK Kabupaten Tangerang	Penanggungjawab Pokja III ; Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
9.	Ir. Jaeni Zailani	Anggota Pokja III TP – PKK Kabupaten Tangerang	Pelaksana kegiatan bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
10.	Ny. Yani Deden	Ketua Pokja IV TP – PKK Kabupaten Tangerang	Penanggungjawab Pokja IV; Kesehatan Lingkungan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan perencanaan sehat
11.	Ny. Sri Eka	Koordinator Ketua TP – PKK Kecamatan se Kabupaten Tangerang	

Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan dianggap paling mengetahui permasalahan yang akan diteliti saat ini yaitu mengenai 10 program pokok PKK di Kabupaten Tangerang. Selain itu, untuk menjangkau lebih banyak informasi penelitian, juga akan dilakukan penyebaran kuisisioner yang ditujukan kepada 29 Ketua TP – PKK Kecamatan se - Kabupaten Tangerang, 273 kader PKK dan 306 masyarakat sebagai sasaran dari 10 program pokok PKK.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau entitas darimana data dikumpulkan untuk keperluan penelitian (Creswell,2021). Sumber ini dapat bervariasi tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan dan bisa meliputi dokumen, orang, perilaku, objek dan lingkungan. Jenis sumber data menurut Creswell :

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi langsung, wawancara, kuesioner,

percobaan, atau teknik pengumpulan data lainnya. Data ini bersifat baru dan belum pernah diproses sebelumnya oleh peneliti atau pihak lain. Pada penelitian ini menggunakan observasi langsung ke lapangan yaitu 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang, wawancara kepada pengurus PKK Kabupaten Tangerang, dan kuisisioner yang ditujukan kepada para Ketua TP – PKK Kecamatan se – Kabupaten Tangerang, para kader PKK dan masyarakat sasaran program pokok PKK.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga sebelumnya. Data ini dapat berasal dari sumber-sumber seperti publikasi ilmiah, basis data, laporan pemerintah, studi sebelumnya, dan sumber informasi lain yang telah dipublikasikan atau tersedia untuk umum. Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu laporan tahunan PKK dan profil PKK Kabupaten Tangerang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses atau cara-cara yang dilakukan penelitian untuk mendapatkan data yang digunakan dalam suatu penelitian. Sebelum penelitian dimulai, maka penelitian didahului dengan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dihadapi oleh peneliti nantinya dan selanjutnya data yang sudah diperoleh dapat mendukung peneliti terhadap masalah yang akan dihadapi. Berikut teknik pengumpulan data pada penelitian ini :

3.6.1 Analisis Data Sekunder

Menurut Creswell (2021) menyatakan bahwa analisis data sekunder merupakan proses yang sangat berharga dalam penelitian, baik dalam pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun campuran. Salah satu keuntungan utamanya adalah efisiensi waktu dan biaya, karena peneliti tidak perlu mengumpulkan data baru, yang sering kali memakan banyak waktu dan sumber daya. Selain itu, data sekunder sering kali sudah

melewati proses validasi dan verifikasi, sehingga meningkatkan keandalan dan kredibilitas data tersebut. Dalam hal ini peneliti secara langsung menganalisis dokumen laporan pelaksanaan 10 program pokok PKK disetiap kecamatan se – Kabupaten Tangerang dan laporan tahunan PKK Kabupaten Tangerang untuk mengevaluasi pelaksanaan program PKK Kabupaten Tangerang.

3.6.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara dalam konteks penelitian adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari partisipan atau responden. Wawancara sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan sikap individu atau kelompok terkait dengan topik penelitian. Tujuan wawancara dalam penelitian yaitu mendapatkan informasi lebih mendalam, lebih memahami konteks, mendapatkan verifikasi dan klarifikasi yang tidak terdapat dalam data tertulis atau survei, dan wawancara dapat membangun hubungan antara peneliti dan partisipan. Menurut Patton (2015), jenis wawancara yang umum digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Wawancara Tidak Terstruktur

Jenis wawancara ini memungkinkan interaksi yang lebih bebas antara peneliti dan responden. Pertanyaan yang lebih umum atau terbuka diajukan kepada responden untuk memungkinkan mereka mengekspresikan pengalaman, pandangan, dan pemikiran mereka dengan cara yang lebih bebas.

2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang sangat efektif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan motivasi individu. Patton menjelaskan bahwa wawancara mendalam melibatkan interaksi satu lawan satu antara peneliti dan peserta, dimana peneliti mengajukan pertanyaan terbuka yang dirancang

untuk mengeksplorasi tema-tema yang relevan dengan topik penelitian. Keuntungan utama dari metode ini adalah kemampuannya untuk menggali informasi yang lebih rinci dan nuansa dari perspektif peserta, yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui metode lain seperti survei atau wawancara terstruktur.

Setiap jenis wawancara memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri tergantung pada tujuan penelitian dan kompleksitas dari topik yang diteliti. Penggunaan jenis wawancara yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Wawancara dilakukan kepada orang yang dipandang dapat memberikan informasi terkait situasi dan kondisi tentang latar belakang penelitian, yang kemudian disebut informan. Dalam penelitian pemilihan informan didasarkan pada tingkat pengetahuan informan terkait permasalahan pada topik penelitian. Fokus dan sampel digunakan dalam menentukan informan. Metode dalam menentukan informan yaitu dengan *Criterion based selection* dengan didasarkan pada kriteria tertentu sesuai dengan jenis data yang dikehendaki oleh penulis.

3.6.3 Kuisisioner Terbuka

Dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner (daftar pertanyaan) untuk perolehan data berdasarkan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan 10 program pokok PKK. Sugiyono (2023) menguraikan bahwa kuisisioner adalah alat yang efektif untuk mengumpulkan data yang terstruktur. Arikunto (2019) menjelaskan bahwa kuisisioner terbuka adalah jenis kuisisioner yang memungkinkan responden memberikan jawaban dengan bebas, tanpa dibatasi oleh pilihan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Arikunto juga menjelaskan terdapat lima keuntungan dari penggunaan survey, diantaranya:

1. Peneliti tidak perlu hadir saat pengisian angket;
2. Dapat disebar secara serentak kepada banyak responden baik;

3. Responden menjawab sesuai dengan kecepatan masing-masing;
4. Angket dapat dibuat anonim yang mampu memancing kebebasan responden dalam menjawab dengan jujur;
5. Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama.

Peserta akan diminta untuk memberikan respons terhadap pertanyaan dalam teks untuk menjelaskan perspektif atau pengalaman mereka kepada peneliti, hal ini dapat menghasilkan keragaman respons (singkat hingga terperinci). Jumlah responden tidak dibatasi dalam penyebaran kuesioner ini untuk mendapatkan keragaman jawaban untuk menghasilkan gambaran yang lebih jelas.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam konteks penelitian, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan tahapan penting dalam proses analisis data yang dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan interpretasi yang valid dari informasi yang dikumpulkan. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai ketiga tahapan tersebut :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penting dalam analisis data yang bertujuan untuk mengurangi kompleksitas data mentah menjadi bentuk yang lebih terkelola dan bermakna tanpa kehilangan esensi informasi yang penting. Menurut Miles dan Huberman, reduksi data melibatkan pemilihan, fokus, penyederhanaan, dan transformasi data mentah menjadi unit-unit yang lebih terkontrol, yang memungkinkan untuk identifikasi pola, tema, atau struktur yang mendasarinya. Teknik pengodean (coding) digunakan untuk mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori atau tema-tema tertentu berdasarkan pada relevansi dengan pertanyaan penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang krusial dari data yang

dikumpulkan, sehingga memfasilitasi analisis yang lebih dalam dan mendalam.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah berikutnya setelah reduksi data, di mana informasi yang telah diolah dan dianalisis disampaikan kepada pembaca atau audiens dengan cara yang sistematis, jelas, dan dapat dimengerti. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disajikan serta untuk menyoroti temuan atau pola penting dari data. Teknik-teknik penyajian data meliputi penggunaan tabel, grafik, diagram, dan narasi deskriptif yang dipilih berdasarkan jenis data dan tujuan komunikasi. Pendekatan yang tepat dalam penyajian data membantu dalam visualisasi pola atau tren yang relevan dari data, serta mendukung interpretasi yang lebih akurat dan jelas.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data, di mana peneliti menyimpulkan hasil dari analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian atau untuk mengajukan hipotesis baru. Menurut Creswell (2021), penarikan kesimpulan melibatkan evaluasi secara kritis terhadap temuan yang diperoleh dari data, mengaitkannya dengan teori yang relevan, serta membuat generalisasi yang tepat berdasarkan bukti yang ada. Hal ini membutuhkan refleksi mendalam terhadap implikasi dari temuan tersebut dalam konteks teoritis dan praktis penelitian. Penarikan kesimpulan yang valid dan kuat harus didasarkan pada analisis yang sistematis, akurat, dan menyeluruh terhadap data yang dikumpulkan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat baru dan belum ada sebelumnya. Temuan ini berupa deskripsi atau suatu gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang namun setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hipotesis atau teori.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 10 Program Pokok PKK di Kabupaten Tangerang telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari terlaksananya seluruh kegiatan yang Gerakan PKK di Kabupaten Tangerang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tangerang. Hal ini dapat terwujud karena PKK Kabupaten Tangerang mendapatkan dukungan dana yang cukup dari Pemerintah Daerah yang dianggarkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Disisi lain, status kelembagaan PKK yang diketuai oleh istri Kepala Daerah juga mendukung penguatan kelembagaan PKK, serta didukung dengan fasilitas – fasilitas dari Pemerintah Daerah. Program – program yang dijalankan PKK secara substansi sama dengan Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bisa terbantu dengan hadirnya PKK dalam implementator di masyarakat.

10 program pokok PKK yang dilaksanakan oleh PKK Kabupaten Tangerang juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tangerang. Program Pokok PKK yang sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga antara lain :

1. Ekonomi, yaitu pada program pangan mempunyai 85.108 peternakan, 33.869 kolam/bak budidaya ikan, 91.445 warung hidup, dan 26.994 lumbung hidup yang semuanya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang. Kemudian pada program tata laksana rumah tangga berdasarkan pendataan yang dilakukan kader – kader PKK, rumah tidak layak huni di Kabupaten Tangerang berjumlah 51.541 pada tahun 2024. Kecamatan Jayanti menjadi kecamatan tertinggi

- dengan jumlah 4.571 rumah tidak layak huni. Upaya yang telah dilakukan PKK Kabupaten Tangerang yaitu melakukan pendataan dan melaporkan ke Pemerintah Daerah serta mencari bantuan ke CSR yang ada di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2024, PKK Kabupaten Tangerang telah berhasil mendapatkan bantuan dari CSR untuk perbaikan 10 rumah tidak layak huni di Kecamatan Gunung Kaler. Kemudian pada program pengembangan kehidupan berkoperasi, yaitu pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), dimana setiap desa di Kabupaten Tangerang sudah memiliki UP2K masing – masing yang dibina langsung oleh pokja II PKK Kabupaten Tangerang.
2. Sosial, yaitu pada program gotong royong. Terdapat 2.551 rukun kematian, 4.617 kelompok keagamaan, 2.270 kelompok jimpitan, dan 2.780 kelompok arisan.
 3. Kesehatan, walaupun jumlah anak stunting di Kabupaten Tangerang naik, dari akhir tahun 2023 berjumlah 6 ribuan anak, dan pada pertengahan tahun 2024 menjadi 17.154 anak , terjadi penurunan yang cukup signifikan pada jumlah keluarga beresiko stunting yang awalnya 77.608 kasus menjadi 51.938 kasus atau 7,7 %. Presentase ini sudah melampaui target penurunan nasional yaitu 14 %. Berbagai upaya telah dilakukan PKK untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, seperti grebek posyandu dan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).
 4. Pendidikan, pada program Pendidikan PKK Kecamatan se – Kabupaten Tangerang telah memfasilitasi 3.037 siswa belajar untuk kejar paket yang terdiri dari paket A, paket B dan paket C. selain itu PKK Kabupaten Tangerang juga mewajibkan kepada seluruh desa untuk membuat PAUD sejenis yang dikelola oleh PKK desa, sampai dengan tahun 2023 jumlah PAUD yang langsung dikelola PKK berjumlah 500 PAUD.

Namun pelaksanaan 10 program pokok PKK di Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan di lapangan diantaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang
2. Kurangnya sumberdaya manusia (kader PKK) karena kegiatan gerakan PKK yang sangat banyak dan membutuhkan kader yang banyak juga
3. Kurangnya kemampuan kader yang ada di Bidang Informasi dan Teknologi (IT) karena sebagian besar kader – kader PKK ini merupakan ibu – ibu rumah tangga

5.2 Saran

Perlu adanya rapat koordinasi yang dihadiri kepala OPD terkait untuk penyesuaian program bersama pemerintah daerah. Rapat koordinasi selama ini hanya diwakilkan pada tingkat kepala bidang sehingga pengambilan Keputusan belum optimal. Selanjutnya, pemberian dana hibah ke PKK juga dapat dilakukan, karena dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2020 disebutkan bahwa sumber anggaran PKK salah satunya menggunakan dana hibah. Hal ini tentunya diharapkan dapat lebih menunjang PKK dalam mencapai sasaran, program, dan kegiatan.

Selain itu, peningkatan kapasitas kader PKK melalui pelatihan-pelatihan, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi, juga perlu menjadi prioritas. Peningkatan sosialisasi program PKK kepada masyarakat juga penting untuk dilakukan guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, serta melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Koordinasi antar lembaga terkait juga perlu ditingkatkan untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program PKK. Hal ini termasuk koordinasi dengan

lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta yang dapat memberikan dukungan bagi program PKK. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan program PKK di Kabupaten Tangerang dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan kesejahteraan yang dimulai dari kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta
- Akbar, M. F., & Mohi W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan : Evaluasi*
Bappenas. (2019). *Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*
- Bharati, Yayuk Farida. (2023). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Birkland, T. A. (2022). *An Introduction to the Policy Process (Edisi ke-5)*. Routledge.
- Badan Pusat Statistika. (2024). *Kabupaten Tangerang Dalam Angka*
- Budiardjo, Miriam. 2019. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Diskominfo Kabupaten Tangerang. (2020). *Capaian RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Dan Penanganan Covid-19*
- Dye, T. R. (2023). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya.
- Sumarlin, honny. (2018). *Ekonomi Keluarga dan PKK*. Jakarta: UI Press.

- Midgley, James. 2021. *Social Welfare for a Global Era: International Perspectives on Policy and Practice*. SAGE Publications.
- Thoha, Miftah. (2015). *Administrasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mirawati. (2018). *Peran PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar
- Moeloek, Nila. (2017). *Kesehatan Masyarakat dan PKK*. Jakarta: EGC.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Natasya, Kinanti. (2024). *Peranan Tim Penggerak PKK Dalam Menggerakkan Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat*. Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Ode, S., Sihombing, G. M. J., Firman, F., & Herawati, D. M. (2022). *Analisis Implementasi Program Hatinya pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelompok Kerja III Kelurahan Tugu Utara Jakarta Utara Tahun 2019-2020*. Jurnal Riset Jakarta
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice (4th ed.)*. SAGE Publications.
- PKK Tanjab Barat. (2024). *Sejarah Singkat Gerakan PKK – PKK Tanjung Jabung Barat*
- Rahayu, Neneng. (2024). *Implementasi Program Kerja Pkk (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Di Desa Ujungbatu Timur Kabupaten Rokan Hulu*. Riau : UIN Sultan Syarif Kasim

- Saldana, J. (2016). *The Coding Manual for Qualitative Researchers (3rd ed.)*
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D Edisi Terbaru*. Bandung: Alfabeta
- Sunarti, Euis. (2013). *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif PKK*. Bogor: IPB Press.
- Sutoro, Eko. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta : Fakultas Fisipol Moestopo Beragama.
- TP – PKK Kabupaten Tangerang. (2023). *Profil PKK Kabupaten Tangerang*
- TP – PKK Kabupaten Tangerang. (2024). *Laporan TP – PKK Kabupaten Tangerang*
- Wulandari, S., & Widowati, A. (2023). *Implementasi Program Sipelandukilat dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman*. Jurnal Kebijakan Pemerintahan
- Zubaidah, Siti. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan – Peraturan

- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)